BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat terpisahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, dimana merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/I/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Adanya kemajuan dan keberadaan teknologi saat ini, memberikan inovasi dan kemudahan dalam melakukan prosedur PBJP. Pemanfaatan teknologi dapat merevolusi sistem PBJ yang memiliki ketepatan dan kecepatan dengan menggunakan aplikasi berbasis web. (Harjito, 2018)

Penerapan sistem *e-Procurement* yang menggantikan metode pengadaan konvensional pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia berawal pada tahun 2002. Menurut Indrajit (2002), implementasi pelaksanaan sistem ini

melewati tiga tahapan, antara lain: (1) Pelaksanaan tampilan semua proses dan hasil dari pengadaan barang dan jasa, ditampilkan via internet yang dilakukan panitia pengadaan, disebut *Copy to Internet* (2) *Semi e-Procurement*, dimana pelaksanaan PBJ dilaksanakan dengan proses komunikasi antar penyedia dan pengguna yang sebagian menggunakan internet sebagai sarana interaksi dan sebagian dilaksanakan secara konvensional. (3) *Full e-Procurement*, yakni pelaksanaan tender penentuan penyedia yang dilakukan secara elektronik melalui metode input dokumen penawaran, namun pemberian keterangan dokumen tender yang dilakukan dengan metode konvensional atau tatap muka antar penyedia dan pengguna barang/jasa..

e-Procurement merujuk pada penggunaan internet yaitu media komunikasi dan informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan dengan *e-Procurement* menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong proses pelelangan umum secara elektronik. Dalam rangka mengimplementasikan sistem ini, pada tahun anggaran 2011 pemerintah mewajibkan penerapan kegiatan PBJP dengan metode *e-Procurement* kepada seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Dengan adanya sistem ini, diharapkan PBJP akan memiliki nilai-nilai transparansi, efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas antara Kelompok Kerja (Pokja) dan Penyedia Jasa.

Kemudian dengan Sistem *e-Procurement*, proses pengadaan akan memiliki lebih sedikit kesalahan dibandingkan dengan sistem konvensional, karena seluruh proses pengadaan dilaksanakan di dalam sistem. Oleh karenanya, diharapkan penerapan dari sistem *e-Procurement* mendorong hasil kerja dari instansi-instansi pemerintah menjadi semakin meningkat. Tender pemilihan penyedia yang

dilakukan secara *online* melalui aplikasi SPSE, menciptakan proses pengadaan yang efisien, efektif, transparan, adil, dan terbuka. Dengan terciptanya proses pengadaan yang memiliki prinsip-prinsip tersebut, tentunya akan mempengaruhi *output* dari proses pengadaan yang dilaksanakan oleh instansi. *Output* kerja yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kemudian mendukung adanya persaingan yang sehat antar penyedia, serta adanya transparansi yang diperlukan bagi masyarakat luas.

Untuk mendukung hal tersebut, pada tahun 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dalam rangka pelaksanaan implementasi *e-Procurement*, sebagaimana tertuang dalam Pasal 131 ayat (1), yang berbunyi K/L/D/I wajib melaksanakan PBJ secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012 dan ayat (2) yang berbunyi K/L/D/I mulai menggunakan *e-Procurement* dalam PBJ disesuaikan dengan kebutuhan, sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan. Selanjutnya, dipertegas dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 sebagai aturan perubahan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 pasal 69 ayat (1) yang berbunyi: Penyelenggaraan PBJ dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Tata cara atau prosedur PBJ melalui sistem *e-Procurement* dituangkan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 tahun 2021 sebagai pengganti Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2018. Selanjutnya, agar pelaksanaan PBJP dengan sistem elektronik dapat dilakukan secara *good governance*, maka pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-

prinsip PBJP yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta aturan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan Cq. Sekretariat Jenderal memiliki komitmen untuk melaksanakan penerapan barang dan jasa secara elektronik atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PBJP yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2020, hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (PLPSE) Kementerian Keuangan yang selanjutnya sesuai dengan amanat Perpres digabungkan dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Keuangan sehingga saat ini keduanya tergabung dalam Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kementerian Keuangan yang secara struktural berada pada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Tujuan penerapan barang dan jasa secara elektronik atau LPSE yang kemudian saat ini disebut dengan sistem *e-Procurement* adalah untuk menghindari terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses PBJP di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini berlandaskan peraturan LKPP No 9 tahun 2021 Pasal 1, dimana menjadi pedoman untuk menyelenggarakan PBJ secara elektronik bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia yang memanfaatkan toko daring dan katalog elektronik, yang bertujuan agar PBJ cepat, mudah; transparan; dan tercatat secara elektronik. Selanjutnya, Layanan Pengadaan Secara Elektronik ditujukan agar dapat menjamin prinsip-prinsip pada pengadaan barang jasa, yaitu efisien, efektif, transparan akuntabel, dan adanya persaingan usaha serta

terbuka dalam kesempatan memasuki pasar selama proses pengadaan secara tender berlangsung, sehingga praktek premanisme dan monopoli yang banyak terjadi saat menggunakan pengadaan secara konvensional dapat dihilangkan.

Pada penerapannya, sistem pengadaan secara elektronik masih mempunyai kendala dalam proses pelayanan pengadaan melalui sistem informasi. Menurut Fatmawati (2015), kendala-kendala yang dialami dalam penerapan *e-Procurement* yaitu diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang menguasai sistem karena pemeliharaan dan pengelolaan sistem yang rumit, penyedia barang/jasa yang tidak mahir dalam penggunaan internet maupun komputer, sampai hal-hal lain seperti adanya kasus pemadaman listrik secara tiba-tiba. Kemudian, menjadi kendala yang signifikan bagi para pelaku pengadaan yang tidak nyaman dengan pekerjaan menggunakan komputer karena tidak terampil mengoperasikan hal-hal yang berkaitan sistem informasi khususnya tata cara pelelangan secara elektronik.

Selain itu, *e-Procurement* memiliki berbagai tantangan teknis dalam penerapannya. Tantangan untuk *e-Procurement* diantaranya adalah terjadi kompleksitas teknis-privasi dan keamanan, adanya masalah hukum seperti informasi, tanda tangan digital untuk dokumen pengadaan, serta sulitnya metoda pembayaran untuk biaya potensi perkembangan dan biaya operasional. Selain itu, tantangan lainnya yaitu memelihara hubungan dengan vendor secara online dan adanya kesenjangan digital untuk usaha kecil. Beberapa instansi pemerintah masih memiliki kesulitan dalam melaksanakan penerapan sistem *e-Procurement* sehingga tujuan dan manfaat dari sistem tersebut masih belum dapat dipenuhi secara maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, mengingat pentingnya PBJ yang baik dan penerapan sistem *e-Procurement*, penulis tertarik untuk meninjau terkait penerapannya pada instansi pemerintah khususnya di Kementerian Keuangan. Tinjauan tersebut akan penulis tuangkan dalam bentuk Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan atas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem *e-Procurement* Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2021“.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa hal pokok yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana kesesuaian prosedur PBJ melalui Sistem *e-Procurement* pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2021 dengan prosedur pada Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2021?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan sistem *e-Procurement* pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2021 dengan prinsip-prinsip PBJP pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021?
3. Bagaimana hambatan dan tantangan penerapan PBJ dengan sistem *e-Procurement* dalam implementasinya pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2021?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kesesuaian prosedur PBJ melalui Sistem *e-Procurement* pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2021 dengan prosedur pada Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.
2. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan sistem *e-Procurement* pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2021 dengan prinsip-prinsip PBJP pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021.
3. Mengetahui hambatan dan tantangan penerapan PBJ dengan sistem *e-Procurement* dalam implementasinya pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, ruang lingkup penyusunan karya tulis terbatas pada tinjauan atas penerapan PBJ dengan Sistem *e-Procurement* yaitu pada transaksi *e-Purchasing* dan *e-Tendering* di UKPBJ Kemenkeu yang secara struktural berada pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan cq. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan pada tahun anggaran 2021 serta kesesuaiannya pada prinsip-prinsip PBJP. Selain itu, penulis juga meneliti hambatan dan tantangan dalam implementasinya pada kegiatan PBJ.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam penerapan ilmu mengenai pelaksanaan PBJ di pemerintah dengan sistem *e-Procurement* dan sebagai referensi dalam penerbitan karya tulis, jurnal, dan penulisan lainnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai keberfungsian secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai jenis rumusan masalah praktis:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan menjadi menjadi media untuk menyalurkan pemikiran kritis mengenai kebijakan PBJ di sektor publik.

b. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah lainnya dalam merumuskan kebijakan terkait PBJ sektor publik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai PBJ dengan sistem *e-Procurement* yang berguna bagi masyarakat para calon penyedia

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Urutan dalam menyelesaikan karya tulis ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang dan tujuan dari pengambilan topik, rumusan masalah yang akan dibahas, manfaat dari penulisan karya tulis, dan sistematika penulisan yang akan diterapkan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA).

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan telaahan studi literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan karya tulis yang berisi definisi, konsep, peraturan dan referensi ilmiah yang berkaitan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai PBJ sektor publik serta sistem *e-Procurement*.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian dan mengungkapkan hasil pembasahan dari topik yang telah diangkat yaitu PBJ melalui sistem *e-Procurement*. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai tinjauan terhadap prosedur pelaksanaan PBJ berbasis elektronik dengan sistem *e-Procurement*, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip PBJP beserta hambatan yang

dialami UKPBJ Kemenkeu yang secara struktural berada pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan cq. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan pada tahun anggaran 2021.

BAB IV SIMPULAN

Dalam bab ini, penulis akan membuat kesimpulan dari hasil tinjauan dan penelitian penulis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Hasil dari simpulan ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkaitan dan juga pembaca.